

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 185 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON
II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penambahan kendaraan roda empat serta untuk menjamin tertibnya pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Eselon II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Unit Kerja Eselon II dengan ketentuan:
- a. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional dinas maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Kerusakan kendaraan dinas yang disebabkan karena penggunaan diluar kepentingan dinas maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 114 Tahun 2016 tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 TENTANG PENANGGUNGJAWAB
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT
 KERJA ESELON II PADA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH
 NOMOR : 185 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 Desember 2016

PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON II
 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	UNIT KERJA	KENDARAAN		
				JENIS	MEREK/TIPE	NO POLISI
1	Ari Sulindra	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/Kijang Innova	B 1734 SQN
2	Moch. Zaini	Kepala Bagian Pengelolaan BMN	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/Kijang Innova	B 1732 SQN
3	Hafiz Ashady	Kepala Bagian Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/Kijang Innova	B 1733 SQN
4	Yasip Kasani	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Toyota/Kijang Innova	B 1735 SQN
5	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1321 SQN
6	Tjipto Prasetyo Nugroho	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1323 SQN
7	Selamet Budiharto	Kepala Bagian Sistem Informasi	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1322 SQN
8	Andi Susanto	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1335 SQN
9	Angga Widita Amirul	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1331 SQN
10	Raden Ari Widiyanto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1325 SQN

11	Erwin Sondang S	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1327 SQN
12	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1328 SQN
13	Hardi Afriansyah	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1320 SQN
14	Eko Rinaldo Octavianus	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1337 SQN
15	Hermawan	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1336 SQN
16	Ria Agustina Nasution	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan	Direktorat Pengembangan Profesi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1326 SQN
17	Ichwan Makmur Nasution	Kepala Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran	Direktorat Pelatihan Kompetensi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1334 SQN
18	Muhammad Firdaus	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	Direktorat Sertifikasi Profesi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1332 SQN
19	Ranto	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangah Wilayah I	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1330 SQN
20	Irawaty Imran	Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangah Wilayah II	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1329 SQN
21	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1341 SQN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO